

Tanjungpinang, Maret 2015

Kepada Yth.

Setditjen Kebudayaan
Kemendikbud

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan revolusi mental birokrasi dan guna meningkatkan kinerja karyawan dilingkungan BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya), perlu perhatian dan persyaratan dasar bagi pejabat Pimpinan UPT BPNB. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di daerah sehingga tentu saja sangat strategis dan perlu perhatian. UPT ini bukanlah sekedar menjalankan program dan penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan kemajuan yang berguna baik itu bagi lembaga maupun masyarakat. Oleh sebab itu perlu standart minimal bagi pimpinan di UPT minimal harus menguasai penggunaan computer dan menguasai standart manajemen. Guna mendukung pelaksanaan kerja Kepala UPT.

Kurangnya perhatian dan tidak adanya standart minimal sehingga di jajaran Kebudayaan khususnya dilingkungan UPT BPNB hingga saat ini ada pimpinan kepala BPNB yang tidak menguasai computer dan lemahnya mengelola bawahannya tetapi tetap dibiarkan tanpa evaluasi dan pergantian dalam rangka penyegaran suasana dan peningkatan kinerja karyawan.

Adapun salah seorang kepala BPNB yang tidak menguasai computer tersebut adalah Kepala BPNB Tanjungpinang. Selain tidak tau computer juga sangat lemah memimpin bawahannya. Aturan yang dibuat selalu berubah-ubah dan tidak ada komitmen yang kuat dalam pekerjaan selama ini.

Bawahannya yang mau menjilat akan diberi pekerjaan lebih walaupun malas bekerja, sehingga menimbulkan kecemburuan dan kemalasan bekerja bagi karyawan lainnya. Untung saja, saat ini ada tunjangan kinerja yang menilai dari absensi sehingga karyawan yang cemburu/malas tetap hadir setiap hari walau sebatas absen.

Ada karyawan bernama Zuryanita yang sangat malas dibanding lainnya, datang sekedar absen tapi karena pandai menjilat akhirnya tetap mendapat porsi lebih dibanding karyawan lainnya. hal itu sudah berlangsung sejak lama.

Padahal SDM calon pengganti yang lebih mampu dan lebih terpercaya banyak dimiliki oleh BPNB Tanjungpinang tetapi seolah tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya dan mampu. Hal ini sungguh memperhatikan bagi karyawan di tanjungpinang. Dan tentunya juga dirasakan oleh masyarakat, dimana keberadaan BPNB tanjungpinang saat ini sudah semakin memudar dan kehilangan kepercayaan public karena banyak kegiatan dilaksanakan asal-asalan.

Seharusnya kepala UPT di daerah ada evaluasi dan pergantian minimal antara 2 – 5 tahun dan yang tidak mampu dan bermasalah harus diganti bukan dibiarkan.

Demikian disampaikan semoga mendapat perhatian.

Hormat kami,

Karyawan Tanjungpinang



S. Rianto

Tembusan Yth: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan